DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-undang No.14 2008 tentang KIP	Satuan Polisi Pamong Praja	Selama Undang- undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data pribadi pegawai
2	Data Pribadi Anggota Linmas	21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		Selama Undang- undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data pribadi Anggota Linmas
3	Dokumen Pelaksanaan Angaran OPD	Permendagri No.52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Selama Tahun Anggaran	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Penetapan Nilai Anggaran yang akurat
4	SPJ, SPM, SPP, SP2D dan Kelengkapan Laporan Keuangan	 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 		Selama Tahun Anggaran	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Menjaga kerahasiaan belanja anggaran
5	Dokumen Kontrak dan Kelengkapan Pengadaan barang/Jasa	 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa 		Selama proses pengadaan barang/jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	bisa menjaga keakuratan dan objektifitas penilaian
6	Kode akses/pasword aplikasi elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE		Selama aplikasi masih berlaku		Keamanan data terjaga dengan baik
7	Identitas dan data pelanggaran penegakan Perda dan Yustisi	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja		Selama Undang- undang berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungiawah	Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik

Madiun, Januari 2020

PAMONG PRAJA MADIUN

SWARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19770618 199511 1 001